



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2024



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sesuai dengan pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang proses penyusunan serta substansinya mengacu kepada Ketetapan Undang-undang No. 25 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dokumen ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dokumen lainnya yang terkait dengan perencanaan pembangunan di sektor Pertanian Tahun 2024.

Semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan sebagaimana mestinya

Mojokerto, Juni 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO



NURUL ISTIQOMAH, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711116 199703 2 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isue-isue Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188/ 61 /416 -118/2023

TANGGAL: 30 Juni 2023

TENTANG

RENCANA KERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTANIAN

TAHUN 2024

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN MOJOKERTO



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PERTANIAN

Jalan R A. Basuni Nomor 17 Mojokerto, Jawa Timur 61361
Telepon 0321 321228, Fax. 0321-394067

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
Nomor: 188/ 61 /416-118/2023

Tentang

RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah Perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto; Keputusan Pertanian Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Kepala Dinas
19. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

: Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja Instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya

KEDUA

: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistic, dan penanaman modal penataan ruang daerah.

KETIGA

: Sistematika Renja Organisasi Perangkat Daerah memuat :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH
BAB V : PENUTUP

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Mojokerto, 30 Juni 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



NURUL ISTIQOMAH, S.E., M.M.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui perencanaan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD. Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2023 ini menyusun Rencana Kerja 2024.

Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja secara sistematis wajib mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan pertanian yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanian tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Rancangan Awal Renja
- b. Penyusunan Rancangan Renja sesuai Renstra 2021-2026 terbaru
- c. Penyusunan Rancangan Akhir Renja
- d. Penetapan Renja Dinas Pertanian

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Tahun 2024 ditempuh dengan perencanaan berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat, rencana pembangunan dirancang oleh daerah sesuai dengan wewenang dan fungsinya pelaksanaannya dengan melibatkan semua pelaku pembangunan, dan perencanaan ini dimulai dari perencanaan hirarki paling bawah baru ke atas. Hubungan antar dokumen Renja (Rencana Kerja), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan umum sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada setiap 5 (lima) tahun sekali.
- b. RPJMD memuat visi, misi, gambaran umum kondisi daerah, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan secara lintas sumber pembiayaan baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

- c. Renstra SKPD, merupakan penjabaran operasional bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif.
- d. Renja SKPD, sebagai pedoman perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang berifat indikatif.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka tindak lanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto pada Anggaran Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Pedomannya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Pertanian Kab. Mojokerto Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi. Berdasarkan periode RPJMD tersebut, Renja Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke empat dari periode Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2021–2026.

Dinas Pertanian menyusun Renja tahun 2024, didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterkaitan dan integrasi program kegiatan yang bersumber dari operasionalisasi program kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian yang juga diselaraskan dengan Renstra Dinas Pertanian tahun 2021- 2026.
2. Prioritas terkait pembangunan pertanian, ketahanan pangan dan perikanan dalam RKPD tahun 2024.
3. Review hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya yang dapat menjadi acuan program kegiatan yang akan ditambahkan atau dilanjutkan untuk tahun 2024.
4. Input hasil Diskusi Kelompok Terbatas Pada Dinas Pertanian dan hasil Musrenbangcam sebagai salah satu rangkaian proses dalam penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2024.
5. Beberapa isu yang berkembang baik pada skala nasional, provinsi ataupun daerah yang perlu diadopsi dalam bentuk program dan kegiatan untuk tahun 2024.

Dokumen Renja Dinas Pertanian tahun 2024 ini berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2024. Renja Dinas Pertanian sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 2024 yaitu “Pemulihan Ekonomi Kerakyatan”.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Tahun 2024 memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4700);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 -2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan satu tahun di bidang Pertanian yang berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi dinas.
- b. Sebagai salah satu instrumen dalam melakukan sinkronisasi keterpaduan program pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto dalam pencapaian misi Kepala Daerah, dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan.
- c. Sebagai pedoman dalam evaluasi kinerja Dinas Pertanian Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan pencapaian visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan Dinas Pertanian yang dijabarkan dari RKPD tahun 2024.
- b. Memberikan acuan pelaksanaan program dan kegiatan serta output dari setiap program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

- c. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pertaniannan pada tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pendaan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menggambarkan sejumlah target kinerja kegiatan/program yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Organisasi dan Pendaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan.

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, berisi latar belakang, landasan hukum yang mendasari, maksud dan tujuan penyusunan Renja PD, serta sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi program kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2022, dan realisasi Renstra dibandingkan dengan target dalam renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2021- 2026, analisis kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, isu-isu penting terkait tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rumusan hasil musrenbang RKPD serta penelaahan usulan program kegiatan dan kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan pemerintah atasan, telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang program dan kegiatan indikator kinerja dan kelompok sasaran Dinas Pertanian tahun 2024.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2024.

Lampiran-lampiran

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu 2022 dan pencapaian Rancangan Renstra Tahun 2021-2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-OPD tahun berjalan yang baru disahkan. Hasil kajian atas evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan capaian Renstra OPD disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan realisasinya.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6.862.644,6	7.219.804,58	105,20%	7,96%

Pencapaian tujuan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target akhir Renstra. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja maupun target Renstra, apakah masih relevan atau perlu dilakukan reuiu.

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Peningkatan produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hortikultura 1. Tanaman Pangan & Hortikultura a. padi b. jagung c. kedelai d. bawang merah e. cabai 2. Tanaman Perkebunan a. Tebu b. Tembakau c. Kopi d. Cengkeh e. Kakao 3. Peternakan a. Daging b. Telur c. Susu	311.384,89 158.943,45 1.339,88 5.849,79 6.038,13 45.880,00 2.110,00 163,00 1,45 102,00 19.700,00 12.250,00 4.550,00	324.230,37 242.084,56 1.622,79 7.026,00 8.031,00 48.149,82 1.798,80 631,46 2,82 110,66 28.045.271 11.081.749 3.214.227	104,12% 152,31% 121,11% 120,11% 133,00% 104,95% 85,25% 387,40% 194,48% 108,49% 142,36% 90,46% 70,64%
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	116.69	103.16* 105.13* (Prov)	88,40% 90,09% (Prov)
Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	% indikator program perangkat daerah yang tercapai	80%	83,33%	104,16%
	% realisasi anggaran perangkat daerah	86%	88,41%	102,80%
	Indeks Profesionalitas ASN	70	74,92*	107,03%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	83,61	99,54%
	Nilai RB Perangkat Daerah	70	81,30	116,14%
Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (aplikasi SINTA: Sistem Informasi Pertanian)	1 aplikasi	1 aplikasi	100%
Meningkatnya ketersediaan dan penggunaan sarana pertanian	% Sarana Pertanian yang Digunakan	20%	20%	100%

Meningkatnya ketersediaan dan penggunaan prasarana pertanian		% Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	20%	100%
Menurunnya kejadian/kasus penyakit hewan menular		% Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	47%	(58%) (naik)	(76,60%) (rendah)
Menurunnya dampak bencana pertanian		% Fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	60%	60%	100%
Terfasilitasinya usulan rekomendasi izin usaha pertanian		% Usulan rekomendasi izin usaha pertanian kab/kota yang terfasilitasi	90%	100%	111,11%
Meningkatnya skor kelas kelompok tani		% Peningkatan skor kelas kelompok tani	4%	4,42%	110,5%

Dari sasaran strategis Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan rata-rata capaian kinerjanya diatas 100%. Capaian kinerja tanaman pangan dan hortikultura semuanya diatas 100% dan masuk kategori Memuaskan. Sedangkan untuk tanaman perkebunan hanya tembakau yang tidak mencapai target (85,25%).

Sedangkan untuk produksi peternakan yang capaian kinerjanya diatas 100% adalah daging (142,36%) dan termasuk kategori Memuaskan, untuk produksi telur capaian kinerjanya 90,46% dan susu yang capaian kinerjanya paling rendah (70,64%).

Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan petani dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) data yang dapat disajikan adalah data terupdate tahun 2021 dengan nilai 103.16 sehingga bila dibandingkan dengan target 116.69, capaian kinerjanya adalah 88,40%, ini termasuk Sangat Baik walaupun tidak mencapai target. Untuk NTP tahun 2022 belum riliis dan penghitungannya dilakukan tahun 2023 dengan pelaksananya (Bappeda, BPS dan konsultan yang ditunjuk).

Untuk sasaran Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel capaian kinerja rata-rata nilainya diatas 100% kecuali Nilai SAKIP 99,54%.

Tahun 2022 didalam Perjanjian Kinerja juga dimasukkan inovasi dan capaian kinerja program, dimana rata-rata capaiannya diatas 100% atau masuk kategori Memuaskan kecuali Program Menurunnya kejadian/kasus penyakit hewan menular yang naik dengan realisasi 58%, padahal target kinerjanya turun 47% sehingga capaian kinerjanya 76,60% (rendah). Hal ini disebabkan naiknya kejadian kasus penyakit hewan menular dengan maraknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Meningkatnya Produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan a. Tan. Pangan - Padi - Jagung - Kedelai b. Tan. Hortikultura - Bawang Merah - Cabai c. Tan. Perkebunan - Tebu' - Tembakau - Kopi - Cengkeh - Kakao d. Peternakan - Daging - Telur - Susu	Jumlah produksi tahun berjalan a. Tan. Pangan - Padi - Jagung - Kedelai b. Tan. Hortikultura - Bawang Merah - Cabai c. Tan. Perkebunan - Tebu' - Tembakau - Kopi - Cengkeh - Kakao d. Peternakan - Daging - Telur - Susu	Hasil analisa jumlah produksi tahun berjalan a. Tan. Pangan - Padi - Jagung - Kedelai b. Tan. Hortikultura - Bawang Merah - Cabai c. Tan. Perkebunan - Tebu' - Tembakau - Kopi - Cengkeh - Kakao d. Peternakan - Daging - Telur - Susu
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai NTP Tahun Berjalan	Hasil analisa NTP tahun berjalan

Tabel 4. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Formulasi
Meningkatnya Produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) e. Tan. Pangan - Padi - Jagung - Kedelai f. Tan. Hortikultura - Bawang Merah - Cabai g. Tan. Perkebunan - Tebu' - Tembakau - Kopi - Cengkeh - Kakao h. Peternakan - Daging - Telur - Susu	Capaian kinerja diperoleh dari: $\frac{\text{Jumlah realisasi produksi}}{\text{Target produksi}} \times 100\%$ Cat: ini berlaku untuk semua indikator produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan produksi peternakan)
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	$\frac{\text{NTP (realisasi)}}{\text{Target}} \times 100\%$

Capaian kinerja dari sasaran meningkatnya produksi pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan diperoleh dari perhitungan perbandingan antara realisasi produksi tahun berjalan dibagi target dikalikan 100%.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5
Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Peningkatan produksi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan hortikultura 1. Tanaman Pangan & Hortikultura a. padi b. jagung c. kedelai d. bawang merah e. cabai 4. Tanaman Perkebunan a. Tebu b. Tembakau c. Kopi d. Cengkeh e. Kakao 5. Peternakan a. Daging b. Telur c. Susu	311.384,89 158.943,45 1.339,88 5.849,79 6.038,13 45.880,00 2.110,00 163,00 1,45 102,00 19.700,00 12.250,00 4.550,00	326.665,92 182.002,99 1.739,65 7.425,80 5.875,20 47.269,50 2.299,20 168,90 2,83 98,60 22.441,185 11.927,054 4.376,326	324.230,37 242.084,56 1.622,79 7.026,00 8.031,00 48.149,82 1.798,80 631,46 2,82 110,66 28.045,271 11.081,749 3.214,227

Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	116,69	103,16*	103,16* 105,13*
Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	% indikator program perangkat daerah yang tercapai	80%	80%	87,22%
	% realisasi anggaran perangkat daerah	86%	85,56	88,41%
	Indeks Profesionalitas ASN	70	74,92*	74,92*
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	81,79	83,61
Meningkatnya ketersediaan dan penggunaan sarana pertanian	Nilai RB Perangkat Daerah	70	69,44	81,30
	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (aplikasi SINTA: Sistem Informasi Pertanian)	1 aplikasi	-	1 aplikasi
Meningkatnya ketersediaan dan penggunaan sarana pertanian	% Sarana Pertanian yang Digunakan	20%	16%	20%
Meningkatnya ketersediaan dan penggunaan prasarana pertanian	% Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	20%	20%
Menurunnya kejadian/kasus penyakit hewan menular	% Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	47%	96%	(76,60%)
Menurunnya dampak bencana pertanian	% Fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	60%	30,05%	60%
Terfasilitasinya usulan rekomendasi izin usaha pertanian	% Usulan rekomendasi izin usaha pertanian kab/kota yang terfasilitasi	90%	-	111,11%
Meningkatnya skor kelas kelompok tani	% Peningkatan skor kelas kelompok tani	4%	3,75%	4,42%

Tabel 6. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 terhadap Target Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	2022			Target Akhir Renstra 2026	Capaian sampai dengan 2022 terhadap 2026
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Peningkatan produksi pertanian Tan. Pangan : - Padi - Jagung - Kedelai	326.665,92	311.384,89	324.230,37	104,12%	326.666	99,25%
			182.002,99	158.943,45	242.084,56	152,31%	182.001	133,01%
			1.739,65	1.339,88	1.622,79	121,11%	1.740	93,26%
		Hortikultura - Bawang Merah - Cabai	7.425,80	5.849,79	7.026,00	120,11%	7.426	94,61%
			5.875,20	6.038,13	8.031,00	133,00%	5.875	136,70%

		Perkebunan	47.269,50	45.880,00	48.149,82	104,95%	47.269	101,86%
		- Tebu	2.299,20	2.110,00	1.798,80	85,25%	2.299	78,24%
		- Tembakau	168,90	163,00	631,46	387,40%	168,9	373,87%
		- Kopi	2,83	1,45	2,82	194,48%	2,82	100%
		- Cengkeh	98,60	102,00	110,66	108,49%	98,6	112,23%
		- Kakao						
		Peternakan:	22.441.185	19.700,00	28.045.271	142,36%	21.539.181	130,21%
		- Daging	11.927.054	12.250,00	11.081.749	90,46%	11.866.798	93,38%
		- Telur	4.376.326	4.550,00	3.214.227	70,64%	4.376.326	73,45%
		- Susu						
2	Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103.16	116.69	103.16*	88,40%	116.79	88,33%

Tabel 7. Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Misi	Sasaran Strategis	Indikator	Formula	Capaian 2018	Capaian Kinerja			2022		Kondisi akhir 2026
					2019	2020	2021	Target	Capaian	
Ke-2 Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan,	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah	PDRB	Jumlah nilai tambah yang timbul dari sektor perekonomian	6.234,21	6.417,78	6.522,86	6.687.589	6.862,64	7.219.804,58	8.712,76
	Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Peningkatan produksi tanaman pangan	Jumlah produksi tahun berjalan							
		- Padi		335.944	307.470	305.874	310.309	311.385	324.230	326.666
		- Jagung		148.837	162.798	155.838	159.547	158.943	242.084	182.001
		- Kedelai		1.576	1.602	1.263	1.390	1.340	1.623	1.740
		Peningkatan produksi tanaman hortikultura								
		- Bawang Merah		6.658	4.862	5.454	7.426	6.038	8.031	7.426
		- Cabai		3.374	6.710	5.805	5.875	5.850	7.026	5.875
		Peningkatan produksi tanaman perkebunan								
		- Tebu		56.581	36.339	45.065	47.269	45.880	48.150	47.269
		- Tembakau		2.171	2.299	2.048	2.299	2.110	1.798	2.299
		- Kopi		148	151	158,4	168,9	163	631,46	168,9
		- Cengkeh		26,10	27,7	26,70	28,2	27,00	28,25	28,2
		- Kakao		95,75	98	98,2	98,6	102	110,66	98,6
		Peningkatan produksi peternakan								
		a. Daging		14.622.358	17.469.947	18.141.449	21.539.181	19.700	28.045	21.539.181
		b. Telur		7.201.130	9.923.757	12.001.182	11.866.798	12.250	11.082	11.866.798
		c. Susu		4.240.746	4.279.800	4.485.400	4.376.326	4.550	3.214	4.376.326
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP	Indeks harga yg diterima petani terhadap indeks harga yg dibayar petani	108.41	116.15	105.21	103.16	116.69	103.16* (kondisi terakhir data tersedia), untuk tahun 2022 masih proses perhitungan	116.79

Tabel TC-29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

NAMA SKPD : DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Tahun 2022	
					Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pertanian									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Profesionalitas ASN	75	67.07	70	74.92	107,03%	70	74,92*	99,89%

					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,6	80,07	82,64	81,79	98,97%	84,4	83,61	97,67 %
					Nilai RB Perangkat Daerah	80	-	61	69,44	113,84%	70	81,30	101,63%
					Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai	100%	85,71%	100%	100%	100%	80%	83,33%	83,33%
					Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	95%	87,12%	90%	80,7%	89,67%	86%	88,41%	93,06%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
				Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dok perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	3 lap	3 lap	3 lap	3 lap	100%	3 lap	3 lap	100%

				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji ASN selama 1 tahun (14 bulan dengan adanya gaji 13 dan gaji 14)	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 bulan	100%
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah sarana aparatur yang dapat terpenuhi	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	100%	2 keg	2 keg	100%
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas ASN dan batik OPD	320 setel	-	-	-	-	198 setel	198 setel	66%
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Tim PAK yang dibiayai dinas dan jumlah ASN yang mengikuti bimtek	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	100%	9 orang	9 orang	100%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang dapat terpenuhi	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 jenis	15 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	25 jenis	30 jenis	120%
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 jenis	38 jenis	15 jenis	33 jenis	220%	18 jenis	18 jenis	180%
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	-	-	-	-	-	10 jenis	4 jenis	-
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum untuk tamu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9 bulan	75%	12 bulan	12 bulan	100%
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah waktu fasilitasi penyediaan belanja perjalanan dinas, rakor dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 jenis	2 jenis	2 jenis	3 jenis	150%	2 jenis	2 jenis	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
				Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	12 bulan/12 orang	12 bulan/12 orang	12 bulan/12 orang	12 bulan/12 orang	100%	12 bulan/12 orang	12 bulan/12 orang	100%

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan perawatan,, biaya operasional (BBM dan servis), perpanjangan perizinan kendaraan dinas operasional	45 kali	10 kali	9 kali	9 kali	100%	35 kali	35 kali	77.78%
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan yang dipelihara dan berfungsi baik	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	100%
				Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik	370 unit	356 unit	370 jenis	293 jenis	79,20%	370 jenis	318 jenis	85,95%
				Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan pengembangan sarana pertanian	20%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	100%
				Kegiatan pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jenis kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan	2 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Jumlah laporan statistik pertanian yang disusun	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	5 laporan	100%

					Jumlah aplikasi data pertanian yang terisi sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	1 aplikasi	1 aplikasi	-
					Jumlah penyelenggaraan pameran untuk produk hasil pertanian yang dilaksanakan	4 kali	-	4 kali	2 kali	50%	2 kali	2 kali	50%
					Jumlah dukungan sarana prasarana usaha tani tembakau (DBHCHT)	6 jenis	-	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bibit tanaman horti yang disediakan	-	-	-	-	-	900 bibit	900 bibit	
					Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan agensi hayati	4 klpk	4 klpk	-	-	-	3 klpk	3 klpk	75%
					Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana RPH dan Pasar Hewan	2 Ps hewan, 5 RPH dan 1 RPU	2 Ps hewan, 5 RPH dan 1 RPU	2 Ps hewan, 5 RPH dan 1 RPU	2 Ps hewan, 5 RPH dan 1 RPU	100%	2 Ps hewan, 5 RPH dan 1 RPU	2 Ps hewan, 5 RPH dan 1 RPU	100%
					Jumlah bantuan bibit tanaman penghijauan yang disediakan (sirsat, jambu merah, sengan, durian)	-	-	5.000 bibit (kakao)	6.000 bibit (kakao)	120%	1.050 bibit	1.050 bibit	
					Jumlah alat penanganan panen dan pasca panen yang diperbantukan (DBHCHT)	6 unit	20 unit	6 unit	6 unit	100%	9 unit	9 unit	150%

				Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota	Jumlah/Jenis komoditas yang dikelola		-	2 jenis	1 jenis	50%	2 jenis	2 jenis	
				Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tumbuhan	Jumlah bibit indukan dan bibit pejantan itik Mojosari yang disediakan		430 ekor	570 ekor	570 ekor	100%	500 ekor	286 ekor	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Luas lahan pembibitan tanaman tebu MOJO 1		-	-	-	-	1 Ha	1 Ha	
				Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah/ Jenis kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang dilaksanakan	3 keg	3 ke	3 keg	3 keg	100%	3 keg	3 keg	100%
				Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah/jenis alat ukur ternak yang disediakan	-	-	-	-	-	3 jenis	3 jenis	-
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah pabrik pakan ternak/toko pakan ternak/ tempat pengolahan pakan ternak yang dimonev	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	100%	20 lokasi	20 lokasi	100%
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota	Jenis pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kab/kota	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%

					Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah kelompok ternak yang dimonev	20 klpk	20 klpk	20 klpk	23 klpk	115%	22 klpk	28 klpk	140%
						Jumlah pengadaan sarana prasarana IB	2 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
						Jumlah petugas IB yang diberi honor	25 org	25 org	25 org	25 org	100%	25 org	19 org	76%
						Jumlah/Luas lahan untuk pakan ternak		4 ha	2 ha	2 ha	100%	2 ha	1,5 ha	
					Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Kab/Kota lain	Jumlah ternak kambing yang diperbantukan ke kelompok ternak		20 ekor	126 ekor	126 ekor	100%	30 ekor	30 ekor	
						Jumlah ternak sapi potong (dari luar daerah) yang diperbantukan ke kelompok ternak		-	-	-	-	10 ekor	5 ekor	
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20%	-	20%	20%	100%	20%	20%	100%
					Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jenis kegiatan pengembangan prasarana pertanian		5 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	

				Sub Kegiatan Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/ KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Luas KP2B yang dikelola	29.710 ha	29.710 ha	29.710 ha	29.710 ha	100%	29.710 ha	29.710 ha	100%
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kios dan distributor pupuk yang dibina dan dimonev		64 kios 9 distributor	65 kios 9 distributor	65 kios 9 distributor	100%	25 kios dan 2 distributor	25 kios dan 2 distributor	
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan direhab		-	9 unit	9 unit	100%	7 unit	7 unit	
				Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang direhabilitasi dan dipenuhi sarprasnya	5 RPH	5 RPH	5 RPH	5 RPH	100%	2 RPH	2 RPH	40%
					Jumlah RPU yang direhabilitasi dan dipenuhi sarprasnya	1 RPU	1 RPU	1 RPU	1 RPU	100%	1 RPU	1 RPU	100%
				Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang direnovasi (DAK Fisik)	1 BPP	-	3 BPP	3 BPP	100%	1 BPP	1 BPP	100%
				Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah gedung puskesmas yang dibangun dan dipenuhi sarpras pendukungnya (DAK Fisik)	1 gedung Puskesmas	-	-	-	-	1 gedung puskesmas	1 gedung puskesmas	100%

					Jumlah gedung Puskesmas yang direnovasi dan dipenuhi saroras pendukungnya (DAK Fisik)	1 gedung Puskesmas	-	-	-	-	1 gedung Puskesmas	1 gedung Puskesmas	100%	
					Jumlah gudang penyimpanan dan rumah fermentasi tembakau yang dibangun/direhab		-	5 unit	5 unit	100%	2 unit	2 unit		
					Kegiatan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kab/kota	Jumlah kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan	-	2 jenis	2 jenis	100%	1 jenis	1 jenis		
					Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak	Frekuensi pembinaan unit manajemen korporasi peternak itik yang dilaksanakan		2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali		
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian/kasus penyakit hewan menular	47%	46,67	47%	100% (naik)	(12,76%)	47%	58% (naik)	(76,60%)
					Kegiatan Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota	Jenis kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan yang dilaksanakan	-	3 jenis	1 jenis	33,33%	1 jenis	1 jenis		
					Sub kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Jumlah unggas (itik) yang divaksinasi flu burung	-	60 ekor	60 ekor	100%	60 ekor	60 ekor		

				Kegiatan pengawasan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kab/kota	Jenis produk asal hewan (ASUH) yang diawasi		-	1 jenis	1 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	
				Sub Kegiatan Penilaian Resiko Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah bahan pangan asal hewan yang ASUH	250 sampel	200 sampel	250 sampel	250 sampel	100%	250 sampel	284 sampel	113,6%
				Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Jenis pelayanan dan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pengujian sampel hewan dan pra akreditasi		-	4.000 sampel	4.000 sampel	100%	5.000 sampel/ 1 keg	15.000 sampel/ 1 keg	
				Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Frekuensi pelayanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan		-	-	-	-	500 kali	500 kali	
					Jumlah koordinasi operasional petugas kesehatan hewan (DAK NF)		-	-	-	-	6 keg	6 keg	
					Jumlah operasional petugas pelapor ISIKHNAS (DAK NF)		-	-	-	-	48 org/bln	48 org/bln	
					Jumlah pembelian obat ternak (DAK NF)		-	-	-	-	2 paket	2 paket	

					Jumlah pengiriman dan pengujian sampel ke laboratorium kesehatan hewan/balai besar veteriner/balai veteriner (DAK NF)		-	-	-	-	2 paket	1 paket		
					Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan		-	-	-	-	2 keg	2 keg	
					Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dari Produk Hewan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis unit usaha		-	-	-	-	1 kali	1 kali	
					Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan produk Hewan	Jumlah ternak kurban yang diperiksa dan dipotong		-	-	-	-	2.250 ekor	3.500 ekor	
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	60%	-	20%	20%	100%	60%	60%	100%
					Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan	3 keg	-	2 keg	2 keg	100%	3 keg	3 keg	100%
					Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah wilayah penyaluran obat-obatan/pestisida tanaman pangan dan hortikultura	18 kec	-	18 kec	18 kec	100%	18 kec	18 kec	100%
						Jumlah Rumah Burung Hantu yang tersedia		-	-	-	-	9 unit	9 unit	

					Jumlah lokasi yang menerapkan manajemen tanaman sehat		-	-	-	-	1 kec	1 kec		
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usulan rekomendasi izin usaha pertanian kab/kota yang terfasilitasi	90%	-	-	-	100%	90%	100%	111,11%
					Kegiatan Penerbitan izin usaha pertanian yang usahanya dalam daerah kab/kota	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian kab/kota yang terfasilitasi	5 izin	-	-	-	-	5 izin rekon	56 izin rekon	1.120%
					Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah rekomendasi izin usaha peternakan yang dikeluarkan	5 izin	-	-	-	-	5 izin rekon	56 izin rekon	1.120%
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan skor kelas kelompok tani	4%	2,8%	3,5%	3,5%	100%	4%	4,42%	110,5%
					Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan	4 keg	6 keg	4 keg	4 keg	100%	4 keg	4 keg	100%
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Pertanian di Kec dan Desa	Jumlah dokumen program pertanian yang tersusun	150 dok	162 dok	155 dok	155 dok	100%	150 dok	150 dok	100%
						Frekuensi pelaksanaan bimtek penyuluh pertanian di tingkat kabupaten	5 kali	1 kali	5 kali	5 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
						Jumlah lembaga penyuluhan yang dinilai	18 BPP	-	-	-	-	18 BPP	18 BPP	100%
					Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Wilayah Kec dan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek kelompok tani di tingkat kab	675 org	460 org	155 org	155 org	100%	120 org	120 org	17,78%

					Jumlah pertemuan bimtek kelompok di tingkat kecamatan	9 kali	-	-	-	-	9 kali	9 kali	100%
					Frekuensi pelaksanaan dan pelatihan kualitas bahan baku (DBHCHT)	10 kali	-	10 kali	5 kali	50%	10 kali	10 kali	
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana pendukung BPP (DAK)	8 BPP	-	4 unit	4 unit	100%	18 BPP	18 BPP	225%
				Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Frekuensi pelaksanaan Bimtek LKM-A Gapoktan	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran Strategis 1, yaitu meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan terdiri dari indikator kinerja produksi padi, jagung dan kedelai yang dikategorikan dalam indikator kinerja produksi tanaman pangan utama. Sedangkan indikator kinerja produksi bawang merah dan cabai dikategorikan dalam indikator produksi pertanian tanaman hortikultura utama. Kemudian indikator produksi tebu, tembakau, kopi, cengkeh dan kakao dikategorikan menjadi indikator kinerja produksi perkebunan. Sedangkan produksi hasil peternakan terdiri dari indikator kinerja produksi daging yang berasal dari daging sapi, domba, kambing, kelinci, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, burung dara, itik dan entok.

Untuk produksi telur berasal dari ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, itik dan entok. Sedangkan produksi susu berasal dari susu sapi dan susu kambing.

- Indikator kinerja produksi tanaman pangan utama

Indikator kinerja produksi tanaman pangan utama terdiri dari produktivitas padi, jagung dan kedelai dengan satuan ton per ha dengan rumus luas panen x produktivitas

1. Realisasi produksi padi pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 104,12% dimana realisasi produksinya sebesar 324.230,37 ton melebihi target yaitu 311.384,89 ton per ha.
2. Realisasi produksi jagung pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 152,31% dimana realisasi produksinya sebesar 242.084,56 ton melebihi target yaitu 158.943,45 ton per ha.
3. Realisasi produksi kedelai pada tahun 2022 capaian kinerjanya sebesar 121,11% dimana realisasi produksinya sebesar 1.492,63 ton melebihi target yaitu 1.339,88 ton per ha.

Komoditas padi, jagung dan kedelai merupakan komoditas pangan utama di Kabupaten Mojokerto karena adanya dukungan sarana prasarana pertanian berupa pembangunan irigasi perpipaan yang merupakan kegiatan yang berasal dari anggaran Tugas Pembantuan dari Dirjen Sarana Prasarana Kementerian Pertanian.

Adanya peningkatan indeks pertanaman (IP) dari 2 menjadi 3 kali tanam dalam setahun. Peningkatan IP padi merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi tingkat nasional.

Produksi jagung pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditentukan karena tingginya minat petani dalam menanam jagung secara swadaya. Hal ini disebabkan karena stabilnya harga jagung di tahun 2022 sebesar Rp 5.900,- per kg, sehingga petani banyak yang menanam jagung karena dianggap lebih menguntungkan. Selain itu luas panen jagung meningkat dari tahun 2021 25.630 ha menjadi 27.953 ha di tahun 2022 dengan sebaran daerah penyumbang Kecamatan Gondang, Kutorejo, Dlanggu, Puri, Trowulan, Jetis dan Dawarblandong.

Produksi kedelai juga mengalami peningkatan di tahun 2022 dan melebihi target yang ditentukan. Meningkatnya luas panen dari tahun 2021 seluas 859 ha menjadi 940 ha di tahun 2022. Keberhasilan ini juga didukung adanya program pemerintah untuk meningkatkan produksi kedelai tingkat nasional di Kabupaten Mojokerto seluas 303 ha. Program tersebut berupa bantuan benih bermutu tinggi sebanyak 15.150 kg dan sarana produksi lainnya untuk 5 kecamatan yaitu Kecamatan Dlanggu 60 ha 3.000 kg, Kecamatan Mojoanyar 80 ha 4.000 kg, Kecamatan Kemlagi 82 ha 4100 kg, Kecamatan Trowulan 66 ha 3.300 kg dan Kecamatan Sooko 15 ha 750 kg benih kedelai.

- Indikator kinerja produksi tanaman hortikultura utama
 1. Produksi tanaman hortikultura utama yaitu bawang merah dan cabai juga mengalami peningkatan produksi diatas 100% melebihi target produksi yang telah ditetapkan. Untuk produksi bawang merah capaian kinerjanya sebesar 120, 11% dengan total produksi 7.026 ton melebihi target 5.849,79 ton.
 2. Produksi tanaman hortikultura yang kedua adalah cabai juga mengalami peningkatan sebesar 133% dengan total produksi 8.031 ton melebihi target produksi yang telah ditetapkan yaitu 6.038,13 ton per ha.

Komoditas tanaman hortikultura bawang merah dan cabai merupakan komoditas yang cukup strategis di Kabupaten Mojokerto. Daerah penghasil bawang merah didominasi Kec. Pacet, sedangkan cabai didominasi Kecamatan Dawarblandong dan Jetis.

Produksi bawang merah mengalami peningkatan karena luas panennya meningkat dari 401 ha tahun 2021 menjadi 467 ha di tahun 2022. Selain itu dukungan kegiatan Tugas Pembantuan APBN 2022 berupa kegiatan Pengembangan Kampung Tanaman Sayur dan Tanaman Obat dengan bantuan berupa bibit bawang merah seluas 10 ha di Kecamatan Pacet.

Sedangkan produksi cabai juga mengalami peningkatan karena luas panen juga meningkat dari 3.416 ha di tahun 2021 menjadi 3.879,5 ha di tahun 2022. Penanganan budidaya tanaman cabai secara benar dan harga cabai yang cukup tinggi menyebabkan banyak petani beralih menanam cabai karena dianggap lebih menguntungkan. Cabai juga menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi di bidang pertanian selain bawang putih. Karena itu tidak menutup kemungkinan jika harga cabai tinggi banyak petani kaya mendadak dari hasil panen cabai. Daerah penghasil cabai terbanyak adalah kecamatan Jetis dan Dawarblandong.

- Indikator kinerja produksi komoditas perkebunan utama

Indikator kinerja produksi komoditas perkebunan utama dengan satuan ton merupakan banyaknya produksi hasil perkebunan utama yang terdiri dari tebu, tembakau, kopi, cengkeh dan kakao.

Realisasi produksi komoditas perkebunan utama pada tahun 2022 diuraikan per komoditas:

1. Realisasi produksi tebu mencapai 104,95% dengan capaian produksi sebesar 48.149,82 ton melebihi target 45.880 ton dan lebih meningkat % dibandingkan tahun 2021 sebesar 47.269,50 ton.
2. Realisasi produksi tembakau mencapai 85,25% dengan capaian produksi 1.798,80 ton. Produksi tembakau tidak mencapai target karena petani banyak menanam varietas yang kurang bagus dan tidak terlalu diminati di pasaran.

Selain itu adanya curah hujan yang tinggi sehingga mempengaruhi kualitas tanaman tembakau. Bahkan dibandingkan tahun 2021, produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 22% dimana produksi tembakau tahun 2021 mencapai 2.299 ton per ha.

3. Realisasi produksi tanaman kopi sebesar 387,40% dengan capaian produksi 631.46 ton melebihi target sebesar 163 ton.

Dibandingkan produksi tahun 2021 , sebanyak 168,9 ton naik sekitar 274%.

4. Realisasi produksi cengkeh 194,48% dengan capaian produksi sebesar 2,82 ton per ha. Peningkatan produksi cengkeh dikarenakan tanaman rata-rata pertumbuhan dan perkembangannya sangat baik sehingga menghasilkan bunga cengkeh yang cukup banyak.

5. Realisasi produksi kakao sebesar 108,49% dengan capaian produksi 110,66 ton melebihi target 102 ton. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2021 naik sebesar 10% dimana produksi kakao tahun 2021 sebesar 98,90 ton.

Komoditas tanaman perkebunan utama yaitu tebu mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena adanya Bongkar Ratun sebanyak 700 ha dan Kebun Benih Datar (KBD) sebanyak 240 ha yang tersebar di Kecamatan Bangsal, Dlanggu, Ngoro, Kemlagi, Trowulan, Jetis dan Jatirejo.

Komoditas tanaman perkebunan tembakau realisasi capaian kinerjanya 85, 25% dengan total produksi 1,798,80 ton dimana termasuk kategori berhasil walaupun tidak mencapai target yaitu 2.110 ha. Hal ini disebabkan salah satunya adalah varietas yang ditanam petani adalah varietas yang kurang bagus dan budidaya yang dilakukan masih konvensional sehingga kurang maksimal dalam memperoleh hasil produksi. Selain itu juga disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banyak tanaman tembakau yang rusak. Kebanyakan petani tembakau Mojokerto menjual hasil produksinya masih berupa lembaran daun dan bukan hasil rajangan karena petani menginginkan segera mendapatkan uang hasil penjualan produksi tembakau yang ditanam.

Produksi komoditas tanaman kopi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan realisasi capaian kinerja 387,4% dengan total produksi 631,46 ton melebihi target produksi yang hanya 163 ton per ha. Kenaikan produksi tanaman kopi disebabkan karena harga kopi yang mahal sehingga petani beralih komoditas dari tanaman asitaba menjadi tanaman kopi karena dianggap sangat menguntungkan. Daerah penghasil kopi terbesar ada di Kecamatan Trawas.

Produksi tanaman cengkeh naik 194,48% dengan total produksi 2,82 ton melebihi target 1,45 ton per ha. Namun demikian kenaikannya hampir sama dengan produksi tahun 2021 yang sebesar 2,82 ton juga. Tanaman cengkeh hasilnya cukup bagus karena kondisi tanaman yang dibudidayakan juga sangat bagus, tidak banyak yang berguguran dari bunga yang dihasilkan.

Produksi kakao mengalami peningkatan sebesar 108,49% dengan total produksi 110,66 ton melebihi target yang ditentukan 102 ton per ha. Banyaknya tanaman yang menghasilkan atau (TM) dibandingkan TBM atau tidak menghasilkan sehingga tahun 2022 buah kakao yang dihasilkan meningkat. Jika dibandingkan dengan produksi tahun lalu sebanyak 98,90 ton maka kenaikannya sebesar 9,7%.

- Indikator kinerja produksi peternakan

Sasaran strategis dari peningkatan produksi pertanian untuk komoditas pertanian meliputi produksi daging, telur dan susu. Produksi daging diperoleh dari daging sapi, kambing, domba, ayam, itik dan entok. Sedangkan telur berasal dari ayam, burung puyuh, itik dan entok. Untuk produksi susu berasal dari sapi dan kambing.

- a. Indikator kinerja produksi daging

Indikator kinerja produksi daging dengan satuan kg menunjukkan banyaknya produksi daging yang terdiri dari daging sapi potong, kambing, domba, ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, dll.

Total produksi daging sektor peternakan utama sebesar 28.045.271 kg atau capaiannya sebesar 142,26% melebihi target 19.700.000.

Dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 21.539.181 kg mengalami peningkatan sebesar 31%

Peningkatan produksi daging didukung dengan peningkatan produksi daging unggas, walaupun terjadi wabah PMK yang menyebabkan penurunan pada populasi sapi dan turunan produksinya, tetapi diimbangi dengan peningkatan populasi hewan unggas sehingga produksi daging meningkat. Kebanyakan diperoleh dari ayam ras pedaging dan ayam buras

b. Indikator kinerja produksi telur.

Indikator kinerja produksi telur dengan satuan kg menunjukkan banyaknya produksi telur yang terdiri dari telur ayam buras, ayam petelur, burung puyuh, itik dan entok.

Produksi telur capaian kinerjanya adalah 90,46% atau sekitar 11.081.749 kg tidak mencapai target sebesar 12.250.000. Jika dibandingkan dengan produksi telur tahun 2021 sebesar 11.866.798 kg sehingga terjadi penurunan produksi sebesar 7%.

Penurunan ini disebabkan karena adanya pemberlakuan batasan wilayah masuknya unggas ke Mojokerto. Pembatasan wilayah berimbas pada banyak hal, mulai dari lalu lintas ternak yang dibatasi, juga berpengaruh pada penyediaan bibit ternak unggas, pakan ternak dan lain-lain. Hal ini juga berpengaruh pada kondisi usaha peternakan. Akibat lain dari penurunan produksi telur disebabkan oleh harga telur yang melambung tinggi pada tahun 2022. Banyaknya peternak yang melakukan afkir dini sehingga harga telur naik, artinya permintaan tinggi tetapi telurnya tidak tersedia karena ayamnya sudah dijual terlebih dahulu yang kemungkinan disebabkan karena harga pakan ternak tinggi.

c. Indikator kinerja produksi susu

Indikator kinerja produksi susu dengan satuan kg/lit menunjukkan banyaknya produksi susu yang terdiri dari susu sapi dan kambing. Untuk produksi susu capaian kinerjanya hanya 70,64% atau 3.214.227 kg/ lit tidak mencapai target 4.550.000 kg/lit.

Bahkan jika dibandingkan dengan produksi susu tahun lalu mengalami penurunan sebesar 26,6% dimana produksi susu tahun 2021 sebesar 4.376.326 kg/lit. Penurunan produksi susu disebabkan karena imbas dari menyebarnya wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) mulai bulan Maret –Agustus 2022 sebanyak 6056 kasus di seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya sapi perah yang mati akibat wabah PMK sehingga produksi susu menjadi berkurang.

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Produksi Pertanian

No	Komoditas	Produksi (ton)		% Capaian
		2021	2022	
1.	Tanaman Pangan			
	a. Padi	326.665,92	324.230,37	(0,75%)
	b. Jagung	182.002,99	242.084,56	33,01%
	c. Kedelai	1.739,65	1.622,79	(6,72%)
2.	Tanaman Hortikultura			
	a. Bawang merah	7.425,80	7.026,00	(5,38%)
	b. Cabai	5.875,20	8.031,00	36,69%
3.	Tanaman Perkebunan			
	a. Tebu	47.269,50	48.149,82	1,86%
	b. Tembakau	2.299,20	1.798,80	(21,76%)
	c. Kopi	168,90	631,46	273,87%
	d. Cengkeh	2,83	2,82	(0,35%)
	e. Kakao	98,60	110,66	12,23%
4.	Peternakan			
	a. Daging	22.441.185	28.045.271	24,97%
	b. Telur	11.927.054	11.081.749	(7,09%)
	c. Susu	4.376.326	3.214.227	(26,55%)

Sasaran strategis kedua, Meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator Nilai Tukar Petani pada tahun 2022 belum dapat disajikan untuk NTP Kabupaten Mojokerto karena proses perhitungan NTP 2022 dilakukan di tahun 2023. Data NTP terakhir yang tersaji di Kabupaten Mojokerto adalah NTP Tahun 2021 yakni sebesar 103.16*. Sedangkan jika memakai estimasi NTP Provinsi Jawa Timur sebesar 105.13*.

Berdasarkan data yang tersaji jika data realisasi yang digunakan adalah NTP 2021 sebesar 103.16, maka capaian kinerjanya sebesar 88,40%, belum mencapai target 116.69. Sedangkan jika data yang dipakai dari angka estimasi NTP Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka realisasi NTP adalah 105.13 sehingga capaian kinerjanya sebesar 90,09%.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dan penambahan modal. Semakin tinggi NTP berarti semakin tinggi daya beli petani di pedesaan.

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib)

$$NTP = \frac{IT}{IB} \times 100 \%$$

NTP Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 belum dapat disajikan/belum rilis karena perhitungannya masih dikerjakan di tahun 2023 oleh Bappeda dan Tim, maka estimasi yang dipakai adalah NTP tahun 2021 dan atau NTP Provinsi Jawa Timur, dimana pada tahun 2022, NTP 105.13. Berdasarkan catatan BPS Jatim, nilai itu dicapai setelah adanya kenaikan NTP sebesar 2,18% dari Bulan November 2022. Sementara, indeks yang diterima petani (It) sebesar 121,56% dan indeks yang dibayar petani (Ib) sebesar 115,63%. Kenaikan NTP ini juga berlaku pada seluruh subsektor pertanian. Kenaikan yang tertinggi adalah subsektor hortikultura mencapai 7,17% dari yang sebelumnya 104,38 menjadi 111,86

Jika dilihat dari target RPJMD 2021-2026 dimana tahun 2021 sebagai tahun dasar untuk penetapan NTP sebesar 116.69 sedangkan capaian kinerja dengan estimasi NTP Provinsi Jawa Timur sebesar 105.13, artinya terjadi penurunan sebesar 9,91.% atau capaian kinerjanya hanya 90,09%. Artinya indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh petani.

Jika dilihat dari target Renstra Dinas Pertanian untuk tahun 2022 sebesar 116.69 dan capaian kinerja dengan data NTP terakhir yang sudah rilis tahun 2021 di Kabupaten Mojokerto sebesar 103.16 terjadi penurunan 11,6% atau capaian kinerjanya sebesar 88,40%.

Artinya indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibayar oleh petani.

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Petani

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	Nilai Tukar Petani	103.16	103.16* 105.13* (prov)	0% 1,91%

Sasaran Strategis ketiga yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Beberapa indikator yang menjadi pengukuran kinerja sasaran ini adalah:

- Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai

Sejak tahun 2021 indikator program perangkat daerah wajib dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak program Perangkat Daerah yang dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Capaian kinerja indikator ini adalah 104,16% dengan realisasi kinerjanya 83,33% melebihi target 80%. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 menurun 16,67%. Hal ini disebabkan ada kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan yaitu Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang berasal dari Dana DBHCHT, dimana kegiatan tidak sesuai dan tidak ada dalam juknis.

- **Persentase realisasi anggaran perangkat daerah**

Capaian kinerja untuk realisasi anggaran perangkat daerah 102, 80% dimana realisasi anggarannya sebesar 88,41. Namun bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaian kinerjanya 85,5% maka ada kenaikan sebesar 4% di tahun 2022.

Beberapa kegiatan memang tidak dapat dilaksanakan seperti Penanganan Dampak Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga kegiatan pameran pertanian organik dan studi banding di Korea tidak dapat dilaksanakan karena Kabupaten Mojokerto belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi sebagai peserta pameran pertanian organik di Korea dimana hasil pertanian organik di Mojokerto belum ada yang bentuknya kering, tetapi masih produk basah semua sehingga kurang layak ditampilkan karena syarat produk yang harus diikuti adalah produk pertanian organik kering.
- **Indeks Profesionalitas ASN**

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran ini bermanfaat dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya.

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan IP ASN Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah 74.92*, dimana data yang tersaji ini adalah IP ASN Tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 belum dilakukan perhitungan. Jika dilihat dari hasil penilaian IP ASN tersebut maka capaian kinerjanya adalah 107.03% melebihi target yaitu 70 dan nilai IP ASN nya masih perlu peningkatan yang lebih lanjut.

- Nilai SAKIP Perangkat Daerah

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik

Nilai SAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah 83,61 atau capaian kinerjanya 99,54% tidak mencapai target, dimana targetnya adalah 84. Tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2021 naik 2,23%, dimana nilai SAKIP tahun 2021 adalah 81,79. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran serta semua yang terlibat di dalam penyusunan SAKIP dan semua ASN Dinas Pertanian yang telah berkontribusi didalam perbaikan kinerjanya baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja, pelaporan, pengawasan maupun rencana aksi yang telah dilakukan.

- Nilai RB Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien, dan akuntabilitas.

Nilai RB Dinas Pertanian pada tahun 2022 adalah 81,30 atau capaian kinerjanya 116,14% dari target 70. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilai RB nya 69,44, maka terjadi peningkatan 17% sehingga capaiannya kinerja sebesar 116,14%. Peran serta semua orang yang terlibat di dalam penyusunan RB Dinas Pertanian dan upaya perbaikan diri dalam pelayanan organisasi adalah kunci utama untuk memperoleh nilai RB yang baik dan perbaikan diri dari semua yang terlibat di dalamnya.

Tabel 10. Pencapaian Kinerja Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	% indikator program perangkat daerah yang tercapai	80%	83,33%	4,16%
2.	% realisasi anggaran perangkat daerah	85,5%	88,41%	3,40%
3.	Indeks Profesionalitas ASN	74,92	(blm rilis)	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,79	83,61	2,22%
5.	Nilai RB Perangkat Daerah	69,44	81,30	17,08%

Sasaran strategis tambahan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah, dengan indikator Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan (aplikasi SINTA: Sistem Informasi Pertanian).

Inovasi menjadi salah satu indikator yang juga wajib dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan setiap OPD mempunyai suatu inovasi yang dapat meningkatkan kinerja dan ada nilai tambahnya.

Dinas Pertanian dalam mengoptimalkan kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah melalui aplikasi SINTA (Sistem Informasi Pertanian) pada tahun 2022 mulai diterapkan dan aplikasi ini berjalan sampai dengan saat ini. Capaian indikator ini 100% dari target 1 aplikasi dapat terealisasi 1 aplikasi. Karena tahun 2021 belum ada inovasi yang dilaksanakan sehingga tidak dapat dihitung untuk peningkatan capaian kinerjanya.

Tabel 11. Pencapaian kinerja Optimalnya Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	1 aplikasi	-

Sasaran strategis dari program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian adalah meningkatnya ketersediaan dan penggunaan sarana pertanian dengan indikator persentase sarana pertanian yang digunakan capaian kerjanya adalah 100%. Artinya dari target 20% dari sarana pertanian yang disediakan, terealisasi 100% dari target. Sarana pertanian yang tersedia diantaranya adalah pupuk bersubsidi, pestisida baik untuk tanaman pangan, hortikultura maupun untuk perkebunan. Demikian juga bantuan alsintan (pompa air, cultivator, roda 3, genset, alat pasca panen).

Tabel 12. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Ketersediaan dan Penggunaan Sarana Pertanian

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	% Sarana Pertanian yang Digunakan	16%	20%	25%

Sasaran strategis dari program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian adalah meningkatnya ketersediaan dan penggunaan prasarana pertanian dengan indikator persentase sarana pertanian yang digunakan capaian kerjanya adalah 100%. Artinya dari target 20% dari sarana pertanian yang disediakan, terealisasi semuanya dari target. Prasarana pertanian yang tersedia diantaranya adalah: Irigasi perpompaan, screenhouse dan RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier), rehabilitasi BPP, Rehabilitasi Puskesmas dan Pembangunan Puskesmas, Pembangunan gudang tembakau (DBHCHT).

Tabel 13. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Ketersediaan dan Penggunaan Prasarana Pertanian

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	% Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	20%	-

Sasaran strategis dari Menurunnya kejadian/kasus penyakit hewan menular juga merupakan hal baru dalam Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja Tahun 2022, karena Sasaran Program dimasukkan untuk dinilai target dan realisasi kinerjanya. Untuk sasaran menurunnya kejadian penyakit hewan menular target yang ditetapkan adalah 47% dimana realisasi kinerjanya justru naik (58%) sehingga capaian kinerjanya (76,60%). Perhitungan ini didapatkan dari kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2022 ada 17.350 kasus, sedangkan tahun 2021 ada 10.984 kasus. Hal ini disebabkan karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi. Jumlah kasus yang disebabkan oleh penyebaran virus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang mamalia di Kabupaten Mojokerto sepanjang tahun 2022 mencapai 6.056 kasus yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 14. Pencapaian Kinerja Menurunnya Kejadian/Kasus Penyakit Hewan Menular

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	% Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	(96%)	(58%)	41,67%

Sasaran strategis dari Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian adalah menurunnya dampak bencana pertanian dengan indikator persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian. Dari target 60% realisasinya adalah 60% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.

Artinya semua terlaksana dengan baik sesuai target yang telah ditentukan. Kegiatannya berupa Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dimana outputnya adalah jumlah pestisida yang tersedia untuk penanggulangan bencana pertanian. Diharapkan dengan ketersediaan pestisida ini jika sewaktu-waktu terjadi bencana pertanian dapat digunakan semaksimal mungkin.

Tabel 15. Pencapaian Kinerja Penurunan Dampak Bencana Pertanian

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	% Fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	30,05%	60%	99,67%

Sasaran strategis Program Perizinan Usaha Pertanian adalah terfasilitasinya usulan rekomendasi izin usaha pertanian dengan indikator kinerja persentase usulan rekomendasi izin usaha pertanian kab/kota yang terfasilitasi. Capaian kinerjanya 111,11% dengan realisasi 100%, melebihi target 90%. Dari target rekomendasi izin usaha pertanian sebanyak 5 realisasinya adalah 56 rekomendasi izin usaha pertanian dengan rincian 1 rekomendasi izin usaha peternakan dan 55 rekomendasi izin usaha kesehatan hewan. Karena tahun 2021 belum dilaksanakan rekomendasi izin usaha pertanian, sehingga tidak dapat dihitung untuk peningkatan capaian kinerjanya.

Tabel 16. Pencapaian Kinerja Perizinan Usaha Pertanian

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	% Usulan rekomen dasi izin usaha pertanian kab/kota yang terfasilitasi	-	56 rekom	-

Sasaran strategis Program Penyuluhan Pertanian adalah Meningkatnya skor kelas kelompok tani dengan indikator kinerja persentase peningkatan kelas kelompok tani

Dalam perkembangan kelas kelompok tani di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022, jumlah kelompok tani tidak mengalami perubahan, berjumlah 1.112 kelompok . Penilaian skor kelas kelompok tani tahun 2022 dari 18 Kecamatan dengan jumlah kelompok tani 1.112, nilai skor kelas kelompok tani sebanyak 520 kelompok. Sedangkan pada tahun 2021 skor kelas kelompok ada 498 kelompok tani. Maka peningkatan skor kelas kelompok tani dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 4,42% sehingga capaian kerjanya adalah 110,5%. Berdasarkan penilaian kelas kelompok di lapangan, tidak semua kelas kelompok statusnya sesuai, artinya kelas kelompok tinggi tetapi kerjanya bila diukur skornya penilaiannya rendah. Terdapat poktan yang tidak sesuai (bubar) namun masih terdaftar.

Penilaian kelas kelompok tani tidak setiap tahun harus ada kenaikan kelas kelompok, tetapi untuk skor penilaian bisa mengalami kenaikan. Kenaikan kelas kelompok tani didukung dengan adanya pembinaan yang intensif dari petugas lapang, baik PPL maupun THL TB PPL dalam rangka meningkatkan SDM petani/kelompok tani yang dibina.

Tabel 17. Pencapaian Kinerja Meningkatnya Skor Kelas Kelompok tani

No	Indikator Kinerja	Tahun		% Capaian
		2021	2022	
1.	% Peningkatan skor kelas kelompok tani	3,6%	4,42%	22,78%

Perkembangan skor kelas kelompok tani tahun 2021 – 2022 tersaji pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Perkembangan Skor Kelas Kelompok Tani

NO	KECAMATAN	JUMLAH POKTAN	POKTAN YANG NAIK SCORE	
			Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jatirejo	67	48	49
2	Gondang	68	63	67
3	Pacet	86	81	86
4	Trawas	43	39	41
5	Ngoro	65	19	22
6	Pungging	71	11	6
7	Kutorejo	92	6	4
8	Mojosari	50	45	47
9	Bangsals	50	38	43
10	Mojoanyar	40	4	2
11	Dlanggu	69	55	69
12	Puri	60	51	60
13	Trowulan	48	8	6
14	Sooko	44	4	2
15	Gedeg	54	7	3
16	Kemlagi	60	5	3
17	Jetis	63	6	4
18	Dawarblandong	82	8	6
JUMLAH		1.112	498	520

Sumber: Bidang Penyuluhan

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian pada tahun 2022, disajikan pada tabel T-C-30

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	
1	PDRB			6.417,78	6.522.86	6.687.59	6.862.64	6.522,86	7.219.80 4,58	7.236.622		
	Jumlah produksi tan. Pangan dan Hortikultura											
	a. Padi			307.470	311.990	310.309	311.385	326.665	324.230	314.140		
	b. Jagung			162.798	162.798	159.547	158.943	182.001	242.084	160.496		
	c. Kedelai			1.602	1.602	1.390	1.340	1.740	1.623	1.378		
	d. Bawang merah			4.862	5.348	5.610	6.038	7.426	7.026	6.155		
	e. Cabai			6.710	5.805	6.127	5.850	5.875	8.031	6.048		
	Jumlah produksi tanaman perkebunan											
	f. Tebu			36.339	43.896	46.417	45.880	47.269	48.150	46.430		
	g. Tembakau			2.299	2.363	2.105	2.110	2.299	1.799	2.146		
	h. Kopi			151	157.8	165.5	163	168.9	631.5	166		
	i. Cengkeh			2.77	2.87	2,76	1.45	2.82	2.82	1.52		
	j. Kakao			98	102.61	102.8	102	98.6	110.66	104		
	Jumlah produksi peternakan											
	k. Daging			17.469.947	20.119.818	22.357.627	19.700.000	21.539.181	28.045.2 71	20.000.000		

	l. Telur			9.923.757	10.675.541	12.659.698	12.250.000	11.866.798	11.081.7 49	12.350.000		
	m. Susu			4.279.800	4.370.664	4.582.194	4.550.000	4.376.326	3.214.22 7	4.600.000		
2	Nilai Tukar Petani			116.15	116.21	116.69	116.71	105.21	103.16	116.73		

2.3. Identifikasi Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, masalah-masalah dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto adalah:

- 1) Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian;
- 2) Belum memadainya ketersediaan sarana produksi pertanian;
- 3) Lemahnya permodalan petani;
- 4) Perlunya pembangunan/rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, dam parit, dan sebagainya;
- 5) Rendahnya SDM aparatur petani.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah tahap pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Mojokerto. RPJMD Kabupaten Mojokerto merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang perlu

ditindak lanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya.

Untuk itulah Dinas Pertanian telah menyusun *draft* RENSTRA Tahun 2021-2026 dan menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 seperti yang tertera pada tabel TC-31 sebagai berikut.

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanian

Lembar dari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				27.198.491.054					27.198.491.054	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.8	19.757.897	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.8	20.684.885.690	
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	5 dok	15.000.000	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	5 dok	15.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 dok	7.500.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	2 dok	7.500.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	3 lap	7.500.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	3 lap	7.500.000	

2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	90%	18.750.298.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Nilai Reformasi Birokrasi	75 nilai	18.750.298.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	188 org/bln	18.739.298.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	188 org/bln	18.739.298.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalitas ASN	78%	11.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Indeks Profesionalitas ASN	78%	11.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 org	11.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Mojokerto	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 org	11.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	90%	318.900.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	90%	318.900.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	24 paket	50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	24 paket	50.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	44.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	44.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dok	9.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dok	9.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan material yang disediakan	4 paket	68.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah paket bahan material yang disediakan	4 paket	68.400.000

	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 lap	7.500.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 lap	7.500.000	
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	90.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 lap	90.000.000	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.. Mojokerto	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	90%	459.770.897	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.. Mojokerto	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	90%	459.770.897	
	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	232.670.897	Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	232.670.897	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	227.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	227.100.000	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90%	214.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90%	214.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit	84.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 unit	84.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan aset tetap lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	10 unit	7.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan aset tetap lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	10 unit	7.000.000	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	93.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	93.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	30.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	30.000.000	
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kec	% sarana pertanian yang digunakan	22%	3.129.584.150	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kec	% sarana pertanian yang digunakan	22%	3.129.584.150	
	Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Semua Kec	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang digunakan		1.755.409.150	Keg. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Semua Kec	Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang digunakan		1.755.409.150	
	Sub. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Semua Kec	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	390.500.000	Sub. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Semua Kec	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	390.500.000	
	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kec	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	1.364.909.150	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kec	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 laporan	1.364.909.150	
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kec	Jumlah komoditas yang dikelola	3 jenis	361.000.000	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kec	Jumlah komoditas yang dikelola	3 jenis	361.000.000	

	Sub kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Semua Kec	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	146.000.000	Sub kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Semua Kec	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	146.000.000	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Semua Kec	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dok	215.000.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Semua Kec	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dok	215.000.000	
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kec	Jumlah kegiatan peningkatan mutu yang dilaksanakan	2 keg	235.000.000	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kec	Jumlah kegiatan peningkatan mutu yang dilaksanakan	2 keg	235.000.000	
	Sub. Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Semua Kec	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Lap	165.000.000	Sub. Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Semua Kec	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Lap	165.000.000	
	Sub. Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Semua Kec	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Lap	70.000.000	Sub. Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Semua Kec	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Lap	70.000.000	
	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Semua Kec	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	1 keg	40.425.000	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Semua Kec	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	1 keg	40.425.000	
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Semua Kec	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Lap	40.425.000	Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Semua Kec	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Lap	40.425.000	

	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kec	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan	1 keg	328.000.000	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kec	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan	1 keg	328.000.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Semua Kec	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	1 Lap	328.000.000	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	1 Lap	328.000.000
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Semua Kec	Jenis komoditas hewan ternak yang diperbantukan	20 ekor	409.750.000	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jenis komoditas hewan ternak yang diperbantukan	20 ekor	409.750.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Semua Kec	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20 ekor	409.750.000	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20 ekor	409.750.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Semua Kec	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	2.102.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	2.102.000.000
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Semua Kec	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan	2 keg	462.000.000	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Semua Kec	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pertanian yang dilaksanakan	2 keg	462.000.000

	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Semua Kec	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dok	288.750.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	Semua Kec	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dok	288.750.000
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kec	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Lap	173.250.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Semua Kec	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Lap	173.250.000
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Semua Kec	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	6 unit	1.400.000.000	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Semua Kec	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab	6 unit	1.400.000.000
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	250.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 unit	250.000.000
	Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1.000.000.000	Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 unit	1.000.000.000
	Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	150.000.000	Sub. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	150.000.000

	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan	2 keg	240.000.000	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan	2 keg	240.000.000	
	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Lap	205.000.000	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Lap	205.000.000	
	Sub Kegiatan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Lap	35.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Lap	35.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	48%	1.079.100.000	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	48%	1.079.100.000	
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan	1 keg	393.250.000	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan	1 keg	393.250.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Lap	393.250.000	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Lap	393.250.000	

	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	1 keg	85.000.000	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan	1 keg	85.000.000
	Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Lap	85.000.000	Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1 Lap	85.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jenis pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan	2 jenis	265.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jenis pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan	2 jenis	265.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Lap	170.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Lap	170.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Lap	95.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Lap	95.000.000
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan yang dilakukan	3 keg	335.850.000	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah kegiatan penerapan dan pengawasan yang dilakukan	3 keg	335.850.000
	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 lap	90.000.000	Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 lap	90.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 lap	95.850.000	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 lap	95.850.000

	Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 lap	150.000.000	Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 lap	150.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	60%	977.700.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Fasilitas Penanggulangan Bencana Pertanian	60%	977.700.000	
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan	2 keg	977.700.000	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan	2 keg	977.700.000	
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	18 ha	451.450.000	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	18 ha	451.450.000	
	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 lap	526.250.000	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 lap	526.250.000	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Presentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	95%	21.500.000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Presentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	95%	21.500.000	

	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha yang terfasilitasi	25 lap	21.500.000	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha yang terfasilitasi	25 lap	21.500.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	25 lap	21.500.000	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	25 lap	21.500.000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	5%	3.420.220.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	5%	3.420.220.000
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit BPP yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian	18 unit	3.420.220.000	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit BPP yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian	18 unit	3.420.220.000

Dari Rancangan yang telah disusun pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang akan diimplementasikan ke dalam penetapan kinerja tahun berikutnya.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan sub kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam penyusunannya perlu memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto, *draft* Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 serta usulan dari masyarakat. Sebagai dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah daerah di bidang pertanian, maka kebijakan yang diambil dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto selalu diselaraskan dengan kebijakan umum Kepala daerah

dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai pembantu Presiden dalam mencapai visi dan misi nasional.

Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Usulan program dan kegiatan yang dirumuskan dalam bentuk kamus usulan untuk mengakomodir usulan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T.C-32 dibawah ini:

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah: Dinas
Pertanian

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besarnya/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kab. Mojokerto	Persentase peningkatan sarana pertanian yang disediakan	20%	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jenis komoditas hewan ternak yang diperbantukan	1 jenis	Pokir (untuk bantuan kambing)
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				
1.	Sujatmiko, S. Pd. M. Si	Ds. Gunungsari Dawarblandong, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras	100 ekor	Jumlah bantuan menyesuaikan besaran anggaran

	2	Ahmad Afifuddin Sya"roni	Dsn. Tirim Ds. Plososari Puri, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	3	Ahmad Afifuddin Sya"roni	Dsn. Geger Ds. Plososari Puri, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	4	Ahmad Afifuddin Sya"roni	Dsn. Kedungklotok Ds. Plososari, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	5	Ahmad Afifuddin Sya"roni	Dsn. Kendalsari Ds. Plososari Puri, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	6	EDI IKHWANTO	Ds. Ngares Kidul, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa timur, Indonesia, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		

	7	EDI IKHWANTO	Ds. Pagerjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	8	EDI IKHWANTO	Ds. Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	9	EDI IKHWANTO	Ds. Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	10	EDI IKHWANTO	Ds. Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	11	EDI IKHWANTO	Ds. Batankrajan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		

	12	EDI IKHWANTO	Ds. Beratwetan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	13	EDI IKHWANTO	Desa Gedeg, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	14	EDI IKHWANTO	Ds. Gembongan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	15	EDI IKHWANTO	Desa Jeruk seger, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	16	EDI IKHWANTO	Ds. Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		
	17	EDI IKHWANTO	Desa Ngares Kidul, Kecamatan Gedeg, Kabupaten	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras		

			Mojokerto, Kab. Mojokerto			
18	EDI IKHWANTO	Desa Terusan, Kecamatan Gedeg, kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras			
19	EDI IKHWANTO	Desa Balongsari, Kecamatan gedeg, kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras			
20	EDI IKHWANTO	Desa Bandung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras			
21	EDI IKHWANTO	Desa gempolkerep kecamatan gedeg kab.mojokerto jatim, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras			
22	EDI IKHWANTO	Desa batankraajan gedeg ,mojokerto,jatim, Kab. Mojokerto	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota lain (Kambing) dan sarpras			



3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah Renstra Kementerian Pertanian

Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024

- a. Sasaran Umum Kebijakan
Pertanian maju, mandiri, dan modern
- b. Strategi Utama
 1. Meningkatkan kesejahteraan petani
 2. Mewujudkan ketahanan pangan
 3. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian
- c. Tujuan
 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani, ketahanan pangan, dan daya saing pertanian
 2. Mengembangkan inovasi IPTEK pertanian
 3. Berkembangnya sarana prasarana pertanian yang bernilai ekonomi
 4. Mengembangkan sistem perkarantinaaan pertanian
 5. Mengembangkan kapasitas SDM dan Pemberdayaan petani
 6. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
- d. Sasaran strategis
 1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
 2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
 6. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan

7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional
8. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

e. Arah Kebijakan

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya daya saing pertanian
3. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian dan tersedianya sarpras pertanian
4. Meningkatnya kualitas SDM pertanian
5. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Pembangunan pertanian (maju, mandiri, dan modern) :

1. Produksi dan Produktivitas :

- Gerakan nasional peningkatan produktivitas, produksi, dan ekspor
- Peningkatan populasi ternak
- Pengembangan SDM pertanian
- *Family Farming*
- Pertanian masuk sekolah

2. Mekanisasi dan *Research* :

- Pengembangan dan penerapan mekanisasi pertanian (pra dan pasca panen)
- Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi

3. Rendah biaya :

- Fasilitasi pembiayaan pertanian (KUR bunga rendah)
- Pengembangan kawasan berbasis korporasi
- Bantuan (subsidi pertanian tepat sasaran)

4. Ekspansi pertanian :

- Optimalisasi pemanfaatan lahan
- Penyediaan air (irigasi, embung, bangunan air)

f. Permasalahan Pembangunan Pertanian

1. Lahan

Konversi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit, dan ketidakpastian status kepemilikan lahan

2. Infrastruktur

Kerusakan jaringan irigasi yang tinggi, pendangkalan waduk, dan kurang memadainya sarana pelabuhan dan transportasi ternak

3. Benih

Sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam dan belum terbangunnya sistem pembibitan sapi nasional

4. Regulasi/Kelembagaan

Perijinan investasi untuk pengembangan integrasi sawit-sapi, perijinan HGU investasi tanaman pangan yang belum diatur petunjuk pelaksanaannya kecuali untuk tebu, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat

5. SDM

Kemampuan petani, peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju, menurunnya minat generasi muda untuk terjun dibidang pertanian, Keterbatasan tenaga penyuluh, pengamat OPT, Pengawas Benih Tanaman serta tenaga kesehatan hewan

6. Permodalan

Sulitnya akses petani terhadap permodalan, tunggakan kredit usaha tani yang belum terselesaikan, persyaratan agunan kredit KKPE berupa sertifikat, menghambat penyaluran

g. Tantangan Pembangunan Pertanian

1. Perubahan iklim
 - Gagal panen yang berakibat kelangkaan/krisis pangan
2. Kondisi Perekonomian Global
 - Terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, harga produk dan biaya produksi menjadi lebih mahal
 - Krisis ekonomi berdampak pada perkembangan ekspor
3. Gejolak Harga Pangan Global
 - Harga pangan yang berfluktuasi akibat perubahan iklim sehingga harga pangan menjadi mahal
4. Bencana Alam
 - Kemampuan dan ketersediaan pangan sering terganggu
5. Peningkatan Jumlah Penduduk
 - Melebihi kapasitas lahan yang tersedia
6. Aspek distribusi
 - Mengingat Indonesia sebagai Negara kepulauan diperlukan aksesibilitas dan sarana transportasi yang lebih efisien
7. Laju Urbanisasi yang tinggi, sehingga generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan/pertanian. Sektor pertanian menjadi kurang diminati generasi penerus.

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	a. Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	a. Kurangnya optimalisasi kinerja dan pelayanan b. Keterbatasan SDM	- Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi informasi, pasar - Belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk dan pestisida - Masih rendahnya daya saing produk pertanian/perkebunan	- Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian - Pesatnya perkembangan teknologi pertanian dari proses produksi

			<p>terhadap produk impor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumberdaya manusia dan kelembagaan belum tangguh - Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian (pemukiman dan industri) - Belum optimalnya pemanfaatan alsintan - Belum optimalnya infrastruktur pertanian 	<p>di hulu hingga pengolahan di hilir</p>
	b. Peningkatan diversifikasi pangan			
	c. Peningkatan komoditas bernilai tambah, daya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor			
	d. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergy			
	e. Peningkatan pendapatan keluarga petani			
	f. Akutabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik			

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

➤ Tujuan

Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan Dinas Pertanian yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan sub sektor pertanian di Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian mengacu pada Rencana Pembangunan Tahunanan daerah (Repetada) dan Renstra serta *draft* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.

Arah kebijakan umum pembangunan pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam upaya merespon permasalahan atau isu yang berkembang adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya.
2. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan dan pendampingan.
3. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.
4. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun nasional.
5. Pengembangan indsutri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa kota
6. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna men
7. umbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.

Tujuan yang ditetapkan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan daerah
2. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustry

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran dan indikator sasaran tahun 2024 yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan, merupakan kondisi yang diprediksikan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkelanjutan.

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2024 yaitu:

- 1. Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan**
- 2. Meningkatnya kesejahteraan petani**

Dalam menentukan sasaran dan indikator sasaran, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tetap mengacu pada sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten dengan beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Dibawah ini disajikan indikator sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan
2. Nilai Tukar Petani (NTP)

3.3. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program yang direncanakan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah 1 program rutin dengan 6 kegiatan 18 sub kegiatan dan urusan pertanian yang merupakan urusan pilihan terdiri 6 program pembangunan pertanian dengan 16 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang mengacu pada *draft* Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 dan sejalan dengan Program Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
- 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyediaan pakaian dinas beserta atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

- 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.4.2 Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.4.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.4.4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 1.4.5 Fasilitasi kunjungan tamu
 - 1.4.6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 1.5.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 1.6.2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 1.6.3 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 2.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 2.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifikasi lokasi
 - 2.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 2.2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2.2.1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan dan Tanaman
- 2.2.2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan
- 2.3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.3.1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
 - 2.3.2 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
 - 2.3.3 Pemeriksaan Mutu, Khasiat, dan Keamanan, Peredaran Obat Hewan
- 2.4. Pengawasan Obat di Tingkat Pengecer
 - 2.4.1. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
- 2.5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.5.1. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- 2.6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - 2.5.1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- 3.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3.1.1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B

- 3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 3.2 Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 3.2.1 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
 - 3.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
 - 3.2.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- 3.3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten /Kota
 - 3.3.1 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun / Galur Ternak
 - 3.3.2 Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 4.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- 4.2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.2.1 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
- 4.3 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.3.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - 4.3.2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

- 4.4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 4.4.1 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - 4.4.2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
 - 4.4.3 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- 5.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - 5.1.2 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan

6. Program Perizinan Usaha Pertanian

- 6.1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 6.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha

7. Program Penyuluhan Pertanian

- 7.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 7.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - 7.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - 7.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - 7.1.4 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
 - 7.1.5 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Rincian program dan kegiatan baik rutin maupun urusan pertanian (urusan pilihan) Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut:

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto

lembar
dari

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERTANIAN

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			22.370.978.897	APBD				23.654.475.340
						Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	Kab. Mojokerto	100%		APBD		100%	23.654.475.340
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD yang disusun	Kab. Mojokerto	9 dokumen	15.000.000	APBD		9 dokumen	20.000.000

3	27	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	Kab. Mojokerto	3 dokumen	7.500.000	APBD		3 dokumen	10.000.000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun	Kab. Mojokerto	6 dokumen	7.500.000	APBD		6 dokumen	10.000.000
						Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	90,00%	21.352.308.000	APBD		91%	22.431.923.400
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pencairan anggaran kegiatan OPD	Kab. Mojokerto	3 dokumen	21.352.308.000	APBD		3 dokumen	22.419.923.400
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	188 org/bln	21.352.308.000	APBD		190 org/bln	22.419.923.400
						Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	75%		APBD		76%	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis kebutuhan sarana dan prasarana kepegawaian yang dipenuhi	Kab. Mojokerto	2 jenis	11.000.000	APBD		2 jenis	12.000.000

3	27	02	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Mojokerto	9 org	11.000.000	APBD		9 org	12.000.000
3	27	03	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis sarana dan prasarana kantor yang terpenuhi	Kab. Mojokerto		318.900.000	APBD			418.330.240
3	27	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Mojokerto	12 paket	50.000.000	APBD		12 paket	57.172.500
3	27	02	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum rapat	Kab. Mojokerto	12 paket	50.000.000	APBD		12 paket	60.373.500
3	27	03	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	44.000.000	APBD		1 paket	75.467.700
3	27	04	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kab. Mojokerto	20 dokumen	9.000.000	APBD		20 dokumen	11.750.000
3	27	04	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Kab. Mojokerto	1 paket	68.400.000	APBD		1 paket	78.473.000

3	27	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Mojokerto	12 laporan	7.500.000	APBD		12 laporan	10.093.540
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	12 laporan	90.000.000	APBD		12 laporan	125.000.000
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kebutuhan penunjang administrasi yang terpenuhi	Kab. Mojokerto	3 jenis	459.770.897	APBD		3 jenis	465.721.700
3	27	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Mojokerto	12 laporan	232.670.897	APBD		12 laporan	235.436.500
3	27	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Mojokerto	12 laporan	227.100.000	APBD		12 laporan	230.285.200
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Mojokerto	4 jenis	214.000.000	APBD		4 jenis	318.500.000
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Mojokerto	30 unit	84.000.000	APBD		30 unit	90.000.000

3	27	01	2.09	01	Pemeliharaan asset tetap lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Kab. Mojokerto	10 unit	7.000.000	APBD		10 unit	8.500.000
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah gedung kantor yang dibangun dan berfungsi baik	Kab. Mojokerto	1 unit	93.000.000	APBD		1 unit	170.000.000
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Mojokerto	20 unit	30.000.000	APBD		20 unit	50.000.000
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian yang disediakan	Kab. Mojokerto	22%	3.251.543.970	APBD		20%	3.620.000.000
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jenis pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dikelola	Kab. Mojokerto	4 jenis kegiatan	2.891.770.600	APBD		4 jenis kegiatan	3.100.000.000
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifikasi lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Kab. Mojokerto	3 laporan	2.252.883.000	APBD		3 laporan	2.500.000.000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kab. Mojokerto	2 laporan	575.000.000	APBD		2 laporan	600.000.000

3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Ogranisme Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Sumber Daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	2 jenis	150.000.000	APBD			150.000.000
3	27	02	2.02	01	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Ds. Centong Kec Gondang, Ds. Karang kedawang Kec. Sooko	1 VUB	100.000.000	APBD		1 VUB	150.000.000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Mojokerto	1 dok	50.000.000	APBD		1 dok	60.000.000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kab/kota	Jenis pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kab/kota	Kab. Mojokerto	2 jenis kegiatan	361.913.700			2 jenis kegiatan	370.000.000
3	27	02	2.05	05	Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Ds. Sajen Kec. Pacet dan Ds. Sentonorejo Kec. Trowulan	150 ton	263.733.700			150 ton	270.000.000
3	27	02	2.05	06	Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan yang disediakan	Kab. Mojokerto	4 laporan	98.180.000	APBD		4 laporan	100.000.000

3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah kab/kota lain	Jenis Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah kab/kota lain	Kab. Mojokerto	1 jenis	153.819.670	APBD		1 jenis	175.000.000
3	27	02	2.06	01	Pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	Jumlah benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	Ds. Begagan limo Kec Gondang, Ds Kembangbelor Kec. Pacet dan Ds Kembangsri Kec. Ngoro	40 ekor	153.819.670	APBD		11 lokasi	175.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	Kab. Mojokerto	20%	1.648.500.000	APBD			2.075.000.000
3	27	03	2.01		Pengembangan prasarana pertanian	Jenis kegiatan pengembangan prasarana pertanian	Kab. Mojokerto	2 jenis kegiatan	623.500.000	APBD		2 jenis kegiatan	725.000.000
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan lahan cadangan pangan berkelanjutan (LPCP2B)	Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan lahan cadangan pangan berkelanjutan (LPCP2B yang dikelola	Kab Mojokerto	1 Dok	155.000.000	APBD		1 dok	200.000.000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Kab. Mojokerto	2 laporan	468.500.000	APBD		2 laporan	525.000.000

3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jenis pembangunan prasarana pertanian yang dibangun	Kab. Mojokerto	3 jenis	1.025.000.000	APBD		3 jenis	1.350.000.000
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Ds. Gondang Kec. Gondang dan Ds. Gayaman Kec. Mojoanyar	3 unit	75.000.000	APBD		3 unit	100.000.000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kec, serta sarana pendukung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Jumlah BPP di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Kec. Trawas	1 unit	500.000.000	APBD		1 unit	750.000.000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	Ds. Pohjejer Kec. Gondang dan Ds. Ngrame Kec. Pungging	2 unit	450.000.000			2 unit	500.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian penyakit hewan menular	Kab. Mojokerto	48%	744.130.000	APBD		48%	840.00.000

3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kab/kota yang dikelola	Kab. Mojokerto	1 jenis	250.000.000	APBD		1 jenis	275.000.000
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Kab. Mojokerto	1 lap	250.000.000	APBD		1 lap	275.000.000
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kab/kota	Kab. Mojokerto	1 jenis	44.130.000	APBD		1 jenis	60.000.000
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah penilaian resiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan	Kab. Mojokerto	1 lap	44.130.000	APBD		1 lap	60.000.000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner dalam daerah kab/kota yang dikelola	Kab. Mojokerto	1 jenis kegiatan	250.000.000	APBD		1 jenis kegiatan	275.000.000
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Kab. Mojokerto	1 lap	250.000.000	APBD		1 laporan	275.000.000

3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Mojokerto	1 jenis kegiatan	200.000.000	APBD		1 jenis	230.000.000
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Mojokerto	1 dok	200.000.000	APBD		1 dok	230.000.000
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	Kab. Mojokerto	60%	865.123.187	APBD		60%	900.000.000
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota	Kab. Mojokerto	2 jenis kegiatan	865.123.187	APBD		2 jenis kegiatan	900.000.000
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kab. Mojokerto	488,16 ha	265.123.187	APBD		488,16 ha	300.000.000
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luasan pencegahan penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab. Mojokerto	100 ha	600.000.000	APBD		100 ha	600.000.000

3	27	06			Progam Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usulan rekomendasi izin usaha pertanian kab/kota yang terfasilitasi	Kab. Mojokerto	95%	15.000.000	APBD		95%	20.000.000
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis kegiatan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kab/kota	Kab. Mojokerto	1 jenis kegiatan	15.000.000	APBD		1 jenis kegiatan	20.000.000
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab. Mojokerto	25 lap	15.000.000	APBD		25 lap	20.000.000
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	Kab. Mojokerto	5%	1.291.395.000	APBD		5%	1.430.000.000
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jenis pelaksanaan penyuluhan pertanian	Kab. Mojokerto	3 jenis	1.291.395.000	APBD		3 jenis	1.430.000.000
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Mojokerto	18 unit	800.000.000	APBD		18 unit	900.000.000
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Mojokerto	30 unit	138.840.000	APBD		30 unit	160.000.000

3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana perkantoran Balai Penyuluhan Pertanian yang disediakan	Kab. Mojokerto	18 BPP	352.555.000	APBD		18 BPP	370.000.000
								Total	30.428.743.454				32.539.475.340



BAB IV

**RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN**

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sesuai dengan usulan program dan kegiatan tahun 2024 disajikan pada tabel 4.1

Rancangan Akhir Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN

Kode	Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						30.428.743.454,00			32.539.475.340,00			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						3.493.616.370,00			3.620.000.000,00			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2.827.883.000,00			3.100.000.000,00			
3	27	02	2.01	01													
					Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan produksi perkebunan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22%	3 Laporan	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	2.252.883.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mendukung program prioritas Kepala Daerah "Mojokerto Makmur", tepatnya pada poin "Mojokerto Berkah"	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	23%	2.500.000.000,00
					Aktivitas sub kegiatan :												
					DBHCHT - Bantuan benih unggul, pupuk, pestisida, tenaga kerja, handtraktor, cultivator, kendaraan R3, pompa air, handsprayer						2.252.883.000,00	4.152.883.000,00					
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

					Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22%	3 Laporan	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	575.000.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT); Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mendukung program prioritas Kepala Daerah "Mojokerto Makmur", tepatnya pada poin "Mojokerto Berkah"	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	23%	600.000.000,00
Aktivitas sub kegiatan :																	
Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura												575.000.000,00				600.000.000,00	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						150.000.000,00					150.000.000,00	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman												
					Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Peningkatan produksi peternakan	1. Desa Centong Kec. Gondang 2. Desa Karangkedawang Kec. Sooko	22%	1 VUB	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Mendukung SDG's 2. Mendukung program prioritas Kepala Daerah "Mojokerto Makmur", tepatnya pada poin "Mojokerto Berkah"	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	23%	150.000.000,00
Aktivitas sub kegiatan :																	
Pelestarian SDG Itik Mojosari												150.000.000,00					
3	27	02	2.02	01	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

					Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan produksi perkebunan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22%	1 Dokumen	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Mendukung SDG's 2. Mendukung program prioritas Kepala Daerah "Mojokerto Makmur", tepatnya pada poin "Mojokerto Berkah"	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	23%	60.000.000,00	
Aktivitas sub kegiatan :																		
Penyediaan bibit kakao, alsintan serta penyelenggaraan bimteknya													50.000.000,00				60.000.000,00	
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							361.913.700,00						370.000.000,00
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak													
					Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Peningkatan produksi peternakan	1. Desa Sentonorejo Kec. Trowulan 2. Desa Sajen Kec. Pacet	22%	150 ton	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	263.733.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mendukung program prioritas Kepala Daerah "Mojokerto Makmur", tepatnya pada poin "Mojokerto Berkah"	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	23%	270.000.000,00	
Aktivitas sub kegiatan :																		
Optimalisasi inseminasi buatan untuk peningkatan populasi													113.733.700,00				120.000.000,00	
Peningkatan konsumsi telur dan susu													150.000.000,00				150.000.000,00	
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan													

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

					Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Peningkatan produksi peternakan	18 Kecamatan	22%	1 Laporan	(Target menyesaikan hasil kegiatan)	98.180.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	23%	100.000.000,00		
					Aktivitas sub kegiatan :													
					Pendataan statistik peternakan							42.180.000,00						45.000.000,00
					Fasilitasi pendampingan pasar hewan dan RPH							50.000.000,00				55.000.000,00		
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							153.819.670,00						
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
					Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan produksi peternakan	1. Desa Kembangri Kec. Ngoro 2. Desa Beganganli mo Kec. Gondang 3. Desa Kembang elor Kec. Pacet	22%	20 Ekor	(Target menyesaikan hasil kegiatan)	153.819.670,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Mendukung SDG's 2. Mendukung program prioritas Kepala Daerah "Mojokerto Makmur", tepatnya pada poin "Mojokerto Berkah"	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	23%	175.000.000,00	
					Aktivitas sub kegiatan :													
					Pengadaan temak kambing / sapi							153.819.670,00						175.000.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							1.648.500.000,00						2.075.000.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian							623.500.000,00						725.000.000,00
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B													

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

					Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B yang Dikelola	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	1 Dokumen	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	155.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	200.000.000,00
Aktivitas sub kegiatan:																
Pemetaan lahan LP2B												155.000.000,00			200.000.000,00	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya											
					Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Peningkatan produksi tanaman pangan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	1 Laporan	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	468.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	525.000.000,00
Aktivitas sub kegiatan:																
Monitoring dan evaluasi distribusi pupuk												68.500.000,00			75.000.000,00	
DBHCHT - Pengadaan perlengkapan dan peralatan jemur												400.000.000,00			450.000.000,00	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian											
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan											
					Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi	Peningkatan produksi peternakan		20%	3 Unit	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	100.000.000,00

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

							dan Dipelihara									Digunakan					
					Aktivitas sub kegiatan:																
					Rehabilitasi Rumah Potong Hewan												75.000.000,00				100.000.000,00
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																
					Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20%	1 Unit	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	500.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pertanian -Peningkatan/ Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian		Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	750.000.000,00				
					Aktivitas sub kegiatan:																
					DAK - Rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian												500.000.000,00				750.000.000,00
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																
					Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Peningkatan produksi perkebunan dan peternakan	1. Desa Ngrame Kecamatan Pungging 2. Desa Pohjejer Kecamatan Gondang	20%	2 Unit	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DBHCH T		Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20%	500.000.000,00				
					Aktivitas sub kegiatan :																
					DBHCHT - Pembangunan rehabilitasi rumah pengeringan tembakau dan sarana pendukungnya												300.000.000,00				

					Rehab pasar hewan Ngrame dan Pohjejer				150.000.000,00											
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				744.130.000,00							840.000.000,00				
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00							275.000.000,00				
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis															
					Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan produksi peternakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48%	1 Laporan	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	49%	275.000.000,00				
					Aktivitas sub kegiatan :															
					Vaksinasi, pemeriksaan kesehatan hewan, dan penanganan gangguan reproduksi											250.000.000,00				
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				44.130.000,00							60.000.000,00				
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan															
					Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Peningkatan produksi peternakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48%	1 Laporan	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	44.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	49%	60.000.000,00				
					Aktivitas sub kegiatan :															
					Pemeriksaan hewan/produk hewan untuk memastikan kualitas ASUH											44.130.000,00				
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000,00							275.000.000,00				
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium															

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

					Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Peningkatan produksi peternakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48%	1 Laporan	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	49%	275.000.000,00
Aktivitas sub kegiatan :																
Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dan pemeriksaan laboratorium												250.000.000,00				275.000.000,00
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						200.000.000,00				230.000.000,00	
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner											
					Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan produksi peternakan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48%	1 Dokumen	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	49%	230.000.000,00
Aktivitas sub kegiatan :																
Pemeriksaan hewan/ternak, pengobatan hewan/ternak di lapangan												200.000.000,00				
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						865.123.187,00				900.000.000,00	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						865.123.187,00				900.000.000,00	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan											
					Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Peningkatan produksi pertanian / perkebunan	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	18 Ha	(Target menyesuaikan hasil kegiatan)	265.123.187,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	60%	300.000.000,00

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

					Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Nilai Tukar (Petani)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	18 Unit	116.75 (nilai)	800.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. Mendukung SDG's 2. Mendukung program prioritas Kepala Daerah "Mojokerto Makmur", tepatnya pada poin "Mojokerto Berkah"	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	5%	900.000.000,00
Aktivitas sub kegiatan :																	
DBHCHT - Pelatihan Budidaya Tembakau, Pelatihan Pascapanen, Manajemen Agribisnis																	
												600.000.000,00					650.000.000,00
Penyusunan Program Penyuluhan																	
												120.000.000,00					150.000.000,00
Temu Teknis Penyuluh Pertanian Lapangan																	
												80.000.000,00					100.000.000,00
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa												
					Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Nilai Tukar (Petani)	- Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5%	30 Unit	116.75 (nilai)	138.840.000,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1. Mendukung SDG's 2. Mendukung program prioritas Kepala Daerah "Mojokerto Makmur", tepatnya pada poin "Mojokerto Berkah"	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	5%	160.000.000,00
Aktivitas sub kegiatan :																	
Bimtek kelompok tani, Mengikuti pameran pertanian skala daerah / nasional																	
												138.840.000,00					160.000.000,00

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
						Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan dan dimanfaatkan	Nilai Tukar (Petani)	18 Kecamatan	5%	18 BPP	116.75 (nilai)	352.555.000,00					370.000.000,00
					Aktivitas sub kegiatan :													
					Pengadaan sarana prasarana BPP													
													352.555.000,00					370.000.000,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
													22.370.978.897,00					23.654.475.340,00
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
													15.000.000,00					20.000.000,00
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	2 Dokumen	75 nilai	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	10.000.000,00
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	3 Laporan	75 nilai	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	10.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
													21.363.308.000,00					22.431.923.400,00
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	188 Orang/bulan	75 nilai	21.352.308.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	22.419.923.400,00
3	27	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	9 Orang	75 nilai	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	12.000.000,00
3	27	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							318.900.000,00			418.330.240,00	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	1 paket	75 nilai	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	57.172.500,00
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	12 Paket	75 nilai	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	60.373.500,00
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	1 Paket	75 nilai	44.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	75.467.700,00
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	20 Dokumen	75 nilai	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	11.750.000,00
3	27	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	1 Paket	75 nilai	68.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	78.473.000,00
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	1 Laporan	75 nilai	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	10.093.540,00
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	12 Laporan	75 nilai	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	125.000.000,00
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							459.770.897,00					465.721.700,00
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	12 Laporan	75 nilai	232.670.897,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	235.436.500,00
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	12 Laporan	75 nilai	227.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	230.285.200,00
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							214.000.000,00					318.500.000,00
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024

					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	30 Unit	75 nilai	84.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	90.000.000,00
3	27	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya												
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	10 unit	75 nilai	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	8.500.000,00
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	1 Unit	75 nilai	93.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	170.000.000,00
3	27	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto, Sooko, Sooko	84,8 (A) nilai	20 Unit	75 nilai	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,2 (A) Nilai	50.000.000,00
TOTAL												30.428.743.454,00					32.539.475.340,00

Pada Rancangan Akhir Renja 2024 ada beberapa perubahan terutama pada jumlah anggaran yang disediakan, dimana pagu rancangan Renja SIPD sesuai kebutuhan.

Adapun perubahannya meliputi sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diusulkan tambahan anggaran untuk TPP ASN P3K dan kekurangan TPP ASN pindahan dari Lumajang sebanyak 1 orang, dari anggaran semula Rp. 18.739.298.000,- menjadi Rp. 21.352.308.000 sehingga ada usulan tambahan sebesar Rp. 2.614.010.000,-
2. Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi hanya diperuntukkan aktivitas rincian DBHCHT tembakau sebesar 2.252.883.000,- Sedangkan rincian kegiatan peningkatan konsumsi telur dan susu sebesar 150.000.000 (setelah ada penambahan 100.000.000) dari semula 50.000.000 pindah ke Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kab/Kota pada Sub Kegiatan Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak. Peningkatan konsumsi telur dan susu diperuntukkan mendukung penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto.

Untuk rincian atau aktivitas sub kegiatan pameran hasil produksi pertanian sebesar Rp. 250.000.000,- ditiadakan, anggaran yang Rp. 125.000.000 ditambahkan pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang semula Rp. 140.123.187,- menjadi Rp. 265.123.187,-.

Sisanya yang Rp. 125.000.000,- ditambahkan pada Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dan usulan tambahan anggaran Rp. 211.112.400,- sehingga total anggaran untuk sub kegiatan ini menjadi Rp. 575.000.000 dari anggaran semula Rp. 238.887.600,-

3. Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan rincian kegiatan/aktivitas kegiatan Fasilitas Pendampingan Pasar Hewan dan RPH sebesar Rp. 50.000.000,- beralih ke Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam daerah Kab/Kota pada Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan/Pakan.
4. Pada program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium bertambah usulan anggaran sebesar Rp. 110.100.000 sehingga menjadi Rp. 250.000.000,- dari anggaran semula Rp. 139.900.000,-.
5. Pada Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dari anggaran semula Rp. 59.970.000,- diusulkan tambahan sebesar Rp. 140.030.000,- sehingga anggaran menjadi Rp. 200.000.000,-



BAB V.

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, serta mempertimbangkan visi, misi, dan dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020.

Proses perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan menerapkan mekanisme perencanaan **bottom up planning** dan **top down policy**. Oleh karena itu kegiatan yang terdapat di dalam Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan hasil dari usulan-usulan kegiatan dari tiap-tiap kecamatan yang disinkronkan dan diselaraskan dengan kebijakan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur maupun dari Pemerintah Pusat dalam hal ini kebijakan Kementerian Pertanian. Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah daerah setempat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya petani di Kabupaten Mojokerto.

Masih adanya beberapa kegiatan yang belum terserap dalam dana baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN (Pusat) berdampak pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tidak tercapai, sehingga diharapkan untuk tahun-tahun ke depan perlu perhatian dari *stakeholder* terkait untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mojokerto.

Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto di tahun-tahun mendatang akan diusahakan dengan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pertanian khususnya dan Pemerintah Daerah umumnya.

Semoga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sepenuhnya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan selaras dengan kebijakan daerah khususnya pembangunan daerah di bidang pertanian secara luas.

Mojokerto, Juni 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO



NURUL ISTIQOMAH, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711116 199703 2 004